



Kapuas Hulu Masih Raih WDP



H Syafaruddin—Arman Hairiyadi

PUTUSSIBAU-RK. Komisi Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Kapuas Hulu tahun anggaran 2013. Penilaian BPK ini masih

sama dengan LPH BPK tahun anggaran 2012 lalu.

"Kita masih WDP, sama seperti tahun sebelumnya. Opini dari BPK ini dikeluarkan pada bulan Juni 2014 kemarin, terhadap pemeriksaan keuangan daerah di tahun 2013," kata Drs H Syafaruddin MM, Inspektur Inspektorat Kapuas Hulu, Selasa (22/7).

Belum bisanya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dikatakan dia karena Pemkab Kapuas Hulu banyak dihadapi permasalahan aset daerah. "Permasalahan aset, dimana banyak aset dari pemerintah pusat yang diserahkan ke daerah, tidak ada surat-surat pendukung. Sehingga tidak ada bukti ontensik aset-aset tersebut milik siapa," beber Syafaruddin.

Berdasarkan temuan BPK, ada sekitar Rp 18 miliar aset yang belum tuntas dan jelas statusnya. Apakah itu aset bergerak maupun tidak bergerak.

Permasalahan aset ini meliputi tanah milik Pemda, sehingga berkaitan dengan sertifikat tanah, termasuk aset-aset lainnya. Banyak dari aset-aset ini berumur sekitar 20 tahun.

"Surat-surat ini harus dicari ke pusat dan provinsi, sehingga menyebabkan menjadi kendala. Untuk itu ke depan kita harus membuat upaya mendata seluruhnya aset-aset yang masih belum terakomodir, supaya status aset ini menjadi jelas," terang Syafaruddin.

Upaya-upaya menyelesaikan permasalahan aset ini terus dilakukan Pemda Kapuas Hulu. Salah satunya mengupayakan pemutihan terhadap aset-aset yang tidak ada lagi barangnya. "Terhadap aset yang sudah tidak layak atau apkir itu kita minta diputihkan. Untuk pemutihan ini ada timnya," pungkasnya. (aRm)